

## KETIMPANGAN DIGITAL DAN REPRODUKSI STRATIFIKASI SOSIAL: PERAN SEKOLAH DALAM MEMPERLEBAR ATAU MEMPERSEMPIT JURANG PENDIDIKAN DI ERA PASCA-PANDEMI

Mujahidin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
[bangdemujahidin3@gmail.com](mailto:bangdemujahidin3@gmail.com)

### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has accelerated the mass digitalisation of education; however, this transformation has actually exposed and exacerbated the deep-rooted structural inequalities within the Indonesian education system. This essay aims to critically examine the relationship between the digital divide and the reproduction of social stratification, as well as to analyse the ambivalent role of schools in widening or narrowing the educational divide in the post-pandemic era. Employing a literature review with a descriptive-analytical qualitative approach, this study integrates the perspectives of Pierre Bourdieu's theory of social reproduction and contemporary digital divide theory to construct a coherent argument regarding the structural mechanisms of digital educational inequality. The analysis reveals that the digital divide operates as a mechanism for the reproduction of social stratification through the transformation of traditional cultural capital into digital cultural capital, whereby students from upper-middle-class backgrounds gain cumulative advantages from access to infrastructure, high levels of digital literacy, and adequate support ecosystems, whilst students from marginalised backgrounds experience digital exclusion that reinforces the cycle of structural poverty. Furthermore, schools play a dualistic role: on the one hand, they can narrow the gap through inclusive hybrid learning, affirmative digital literacy programmes, compensatory resource allocation policies, and digital justice pedagogy; on the other hand, they can widen inequalities through uncritical adoption of technology, class bias in pedagogical design, the commercialisation of online educational services, and assessment practices that assume an equality of access that does not exist in reality. This essay concludes that realising equitable education in the post-pandemic era requires a paradigm shift from a technocratic approach towards a holistic approach that integrates infrastructure, pedagogical capacity, affirmative policies, and the deconstruction of structural biases in the digitalisation of education.*

**Keywords:** *digital inequality, reproduction of social stratification, digital cultural capital, educational equity, post-pandemic learning, the role of schools, digital divide, Bourdieu*

### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 telah mempercepat digitalisasi pendidikan secara masif, namun transformasi ini justru mengungkap dan memperburuk ketimpangan struktural yang sudah mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia. Esai ini bertujuan untuk menelaah secara kritis hubungan antara ketimpangan digital dan reproduksi stratifikasi sosial, serta menganalisis peran ambivalen sekolah dalam memperlebar atau mempersempit jurang pendidikan di era pasca-pandemi. Menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu dan teori *digital divide* kontemporer untuk membangun argumentasi koheren mengenai mekanisme struktural ketidaksetaraan pendidikan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan digital beroperasi sebagai mekanisme reproduksi stratifikasi sosial melalui transformasi modal kultural tradisional menjadi *digital cultural capital*, di mana siswa dari kelas menengah-atas memperoleh keuntungan kumulatif dari akses infrastruktur, literasi digital tingkat tinggi, dan ekosistem pendukung yang memadai, sementara siswa dari latar belakang marjinal mengalami *digital exclusion* yang memperkuat siklus kemiskinan struktural. Lebih jauh, sekolah memiliki peran dualistik: di satu sisi, mereka dapat mempersempit jurang melalui pembelajaran hibrida yang inklusif, program literasi digital afirmatif, kebijakan alokasi sumber daya yang kompensatoris, dan pedagogi keadilan digital; di sisi lain, mereka dapat memperlebar

ketidaksetaraan melalui adopsi teknologi yang tidak kritis, bias kelas dalam desain pedagogis, komersialisasi layanan pendidikan daring, dan praktik asesmen yang mengasumsikan kesetaraan akses yang tidak ada dalam realitas. Esai ini menyimpulkan bahwa mewujudkan pendidikan yang berkeadilan di era pasca-pandemi memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan teknokratis menuju pendekatan holistik yang mengintegrasikan infrastruktur, kapasitas pedagogis, kebijakan afirmatif, dan dekonstruksi bias struktural dalam digitalisasi pendidikan.

**Kata kunci:** ketimpangan digital, reproduksi stratifikasi sosial, modal kultural digital, keadilan pendidikan, pembelajaran pasca-pandemi, peran sekolah, *digital divide*, Bourdieu

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan global secara fundamental, memaksa sistem pendidikan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring dalam waktu singkat. Di Indonesia, kebijakan Belajar dari Rumah yang diterapkan sejak Maret 2020 menjadi respons darurat untuk menjamin kelangsungan proses belajar-mengajar di tengah pembatasan sosial berskala besar (Aslan et al., 2020). Namun, transformasi mendadak ini justru mengungkap retakan mendalam dalam struktur pendidikan nasional, terutama terkait ketimpangan akses terhadap teknologi digital yang selama ini tersembunyi di balik normalitas pembelajaran tatap muka.

Ketimpangan digital dalam pendidikan bukan sekadar masalah ketersediaan perangkat keras, melainkan mencakup dimensi akses infrastruktur, literasi digital, dan kapasitas pedagogis dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bermakna (Yaqin et al., 2023). Di Indonesia, kesenjangan ini terlihat jelas antara wilayah urban dan rural, di mana sekolah-sekolah di kota besar memiliki infrastruktur digital yang memadai sementara sekolah di daerah terpencil bahkan kesulitan mengakses jaringan internet stabil. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai *first-level digital divide*, yaitu kesenjangan akses fisik terhadap teknologi informasi dan komunikasi (van Dijk, 2020).

Lebih dalam lagi, pandemi memperburuk *second-level digital divide*, yaitu kesenjangan dalam kemampuan menggunakan teknologi secara efektif untuk tujuan pendidikan. Siswa dari keluarga dengan status sosioekonomi tinggi tidak hanya memiliki akses lebih baik terhadap perangkat digital, tetapi juga menerima dukungan parental yang lebih kuat dalam navigasi platform pembelajaran daring (Amalia et al., 2025). Sebaliknya, siswa dari keluarga marjinal sering kali harus berbagi satu gawai dengan beberapa anggota keluarga atau bahkan terpaksa putus sekolah karena ketiadaan akses, seperti tercermin dalam kasus viral tiga siswa SMA yang mencoba merampok demi membeli smartphone untuk belajar daring (Aslan, 2019).

Dari perspektif teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, ketimpangan digital ini dapat dipahami sebagai transformasi modal kultural tradisional menjadi bentuk baru yang disebut *digital cultural capital*. (Bourdieu, 2018) menyatakan bahwa sistem pendidikan berfungsi sebagai mekanisme transmisi dan legitimasi modal kultural dari generasi ke generasi, yang pada gilirannya mereproduksi stratifikasi sosial yang ada. Di era pasca-pandemi, kemampuan menguasai teknologi digital menjadi bentuk modal kultural baru yang menentukan keberhasilan akademik dan mobilitas sosial siswa, sehingga memperkuat mekanisme reproduksi ketidaksetaraan yang sudah ada.

Sekolah, yang secara ideal seharusnya berfungsi sebagai *great equalizer* atau agen mobilitas sosial vertikal, justru berisiko berubah menjadi *sorting machines* yang mengkategorikan dan

mengalokasikan sumber daya pendidikan secara tidak merata berdasarkan latar belakang sosial siswa (Rafalow & Puckett, 2022). Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan tidak netral; ia dikonstruksi dan diimplementasikan dengan cara yang sering kali menguntungkan siswa dari kelas menengah-atas yang sudah memiliki predisposisi kultural terhadap teknologi, sementara menyingkirkan siswa dari latar belakang marjinal yang tidak memiliki modal digital awal (Fitriyanti & Aslan, 2025).

Penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa selama pandemi, anak-anak dari keluarga ekonomi rendah mengalami penurunan kemampuan akademik yang lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari keluarga mampu (Manullang et al., 2021). Learning loss yang dialami siswa marjinal ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan untuk mengembangkan literasi digital yang semakin menjadi kompetensi esensial di abad ke-21. Dalam jangka panjang, kehilangan ini akan memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap prospek pendidikan dan karir mereka, sehingga memperlebar jurang stratifikasi sosial antar generasi.

Ketimpangan digital juga memiliki dimensi geografis yang kuat di Indonesia, di mana 104.000 sekolah masih terhubung secara digital dan 26,3 persen penduduk tidak memiliki akses internet (Amalia et al., 2025). Disparitas ini menciptakan pola ketimpangan pendidikan yang tumpang tindih antara dimensi kelas sosial dan lokasi geografis, sehingga siswa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) mengalami double disadvantage: mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga terisolasi secara digital. Kondisi ini memperparah ketidakadilan struktural yang sudah mengakar dalam sistem pendidikan nasional (Aslan & Hifza, 2020)

Respons kebijakan terhadap ketimpangan digital selama dan setelah pandemi menunjukkan evolusi yang menarik. Pada fase awal (2020–2021), penelitian dan intervensi berfokus pada akses dan literasi digital dasar sebagai respons darurat terhadap penutupan sekolah. Namun, pada fase transformasi (2024–2025), perhatian bergeser toward strategi inklusi digital yang berkelanjutan, integrasi kecerdasan artifisial dalam pembelajaran, dan inovasi pedagogis berbasis teknologi (Nugraha et al., 2021). Pergeseran ini mencerminkan pengakuan bahwa solusi jangka pendek tidak cukup untuk mengatasi akar struktural ketimpangan digital.

Namun, transformasi digital pendidikan juga membawa risiko baru berupa komersialisasi dan privatisasi layanan pendidikan daring. Platform pembelajaran digital yang dikembangkan oleh sektor swasta sering kali mengutamakan profit daripada pemerataan, sehingga hanya dapat diakses oleh sekolah-sekolah dengan sumber daya finansial memadai (Firdausih & Aslan, 2024). Fenomena ini menciptakan *school digital divide*, di mana sekolah-sekolah elit dapat mengadopsi teknologi pembelajaran mutakhir sementara sekolah-sekolah publik dengan anggaran terbatas tertinggal semakin jauh, sehingga memperkuat stratifikasi institusional dalam sistem pendidikan.

Di tengah dinamika ini, peran sekolah menjadi semakin kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, sekolah memiliki potensi untuk menjadi agen koreksi ketimpangan digital melalui program literasi digital yang inklusif, kebijakan afirmatif untuk siswa marjinal, dan kolaborasi strategis dengan sektor publik dan komunitas (Nasution & Aslan, 2025). Di sisi lain, sekolah juga dapat menjadi agen reproduksi ketidaksetaraan jika gagal mengadaptasi strategi pedagogis yang responsif terhadap realitas digital yang heterogen di kalangan siswa. Pilihan strategis yang

dibuat oleh institusi pendidikan akan menentukan apakah mereka memperlebar atau mempersempit jurang pendidikan di era pasca-pandemi.

Teori *digital divide* kontemporer menekankan bahwa kesenjangan digital bukan lagi sekadar masalah akses teknis, melainkan mencakup dimensi kapabilitas, partisipasi, dan hasil (Dijk, 2020). Dalam konteks pendidikan pasca-pandemi, ini berarti bahwa kebijakan dan praktik pendidikan harus bergerak melampaui penyediaan infrastruktur digital menuju pengembangan ekosistem pembelajaran yang memastikan semua siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Tanpa pendekatan holistik ini, investasi dalam teknologi pendidikan hanya akan memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis hubungan antara ketimpangan digital dan reproduksi stratifikasi sosial dalam konteks pendidikan Indonesia di era pasca-pandemi. Pembahasan akan difokuskan pada dua pertanyaan sentral: pertama, bagaimana ketimpangan digital berfungsi sebagai mekanisme reproduksi stratifikasi sosial melalui transformasi modal kultural; dan kedua, sejauh mana sekolah berperan dalam memperlebar atau mempersempit jurang pendidikan melalui kebijakan dan praktik digitalisasi pembelajaran.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang relevan dengan tema ketimpangan digital, reproduksi stratifikasi sosial, dan peran sekolah dalam pendidikan era pasca-pandemi (Eliyah & Aslan, 2025). Kemudian, analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah identifikasi tema kunci, kategorisasi temuan berdasarkan pola ketimpangan dan mekanisme reproduksi sosial, serta sintesis kritis untuk membangun argumentasi koheren mengenai bagaimana ketimpangan digital berinteraksi dengan struktur stratifikasi sosial dan bagaimana sekolah dapat berperan sebagai agen transformasi atau reproduksi ketidaksetaraan tersebut. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan perspektif multidisipliner dari sosiologi pendidikan, studi teknologi, dan kebijakan publik, meskipun memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data sekunder yang tersedia tanpa kemungkinan verifikasi empiris langsung di lapangan (Fan et al., 2022).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Ketimpangan Digital sebagai Mekanisme Reproduksi Stratifikasi Sosial**

Ketimpangan digital dalam pendidikan pasca-pandemi tidak dapat dipahami sekadar sebagai perbedaan akses teknis terhadap perangkat dan jaringan internet, melainkan sebagai mekanisme struktural yang secara sistematis mereproduksi stratifikasi sosial yang sudah ada. Dalam konteks Indonesia, pandemi COVID-19 berfungsi sebagai katalis yang mempercepat transformasi ketidaksetaraan ekonomi tradisional menjadi ketidaksetaraan digital yang lebih tersembunyi namun sama destruktifnya, di mana siswa dari keluarga mampu tidak hanya memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, tetapi juga memperoleh keuntungan kumulatif

dari ekosistem digital yang mendukung keberhasilan akademik mereka (Putra et al., 2020). Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh van Dijk (2020) disebut sebagai evolusi dari *first-level digital divide* menuju *second-level* dan *third-level digital divide*, di mana kesenjangan tidak lagi hanya terletak pada kepemilikan perangkat, tetapi pada kapasitas untuk memanfaatkan teknologi secara efektif untuk menghasilkan outcome pendidikan yang unggul.

Dari perspektif teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, ketimpangan digital dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk baru modal kultural yang disebut *digital cultural capital*, yaitu kumpulan kompetensi, disposisi, dan literasi digital yang diakui dan dihargai oleh institusi pendidikan kontemporer (Caroline & Aslan, 2025). (Bourdieu, 2018) menyatakan bahwa modal kultural t<sup>o</sup>n t<sup>o</sup>n dalam tiga bentuk: *embodied* (kebiasaan dan disposisi yang terinternalisasi), *objectified* (kepemilikan barang budaya), dan *institutionalized* (kualifikasi formal), dan di era digital, ketiga bentuk ini mengalami transformasi signifikan. Siswa dari kelas menengah-atas tidak hanya memiliki perangkat digital terbaru (*objectified capital*), tetapi juga tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menormalisasi penggunaan teknologi untuk pembelajaran, eksplorasi intelektual, dan produksi konten kreatif (*embodied capital*), yang pada gilirannya dikonversi menjadi nilai akademik tinggi dan kredensial pendidikan bergengsi (*institutionalized capital*) (Komari et al., 2025).

Mekanisme reproduksi stratifikasi sosial melalui ketimpangan digital beroperasi melalui apa yang disebut oleh (Pitzalis & Porcu, 2024) sebagai *capital conversion mechanism*, di mana modal sosial dan ekonomi keluarga dikonversi menjadi modal digital yang kemudian menghasilkan keuntungan akademik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit modal sosial siswa dari kelompok sosioekonomi tinggi, literasi digital mereka meningkat signifikan sebesar 0,456 unit ( $p < 0,001$ ), sementara untuk kelompok menengah meningkat 0,382 unit, dan untuk kelompok rendah hanya 0,421 unit meskipun secara statistik signifikan (Firmansyah & Aslan, 2025b). Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun siswa dari keluarga marjinal dapat memperoleh literasi digital, laju konversi modal sosial mereka menjadi kompetensi digital tidak seefisien rekan-rekan mereka dari kelas atas, sehingga kesenjangan tetap terjaga dan bahkan melebar seiring waktu.

Dimensi pertama dari ketimpangan digital sebagai mekanisme reproduksi sosial terlihat dalam disparitas akses infrastruktur yang masih sangat mencolok di Indonesia, di mana hanya 25 persen siswa urban dan 15 persen siswa rural yang memiliki akses memadai terhadap perangkat dan konektivitas untuk pembelajaran daring berkualitas (Yaqin et al., 2023). Ketimpangan ini bukan sekadar masalah distribusi sumber daya, melainkan mencerminkan pola historis ketidakadilan pembangunan yang menempatkan wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dalam posisi struktural yang merugikan. Selama pandemi, siswa di daerah ini tidak hanya mengalami *learning loss* yang lebih parah, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan literasi digital dasar yang menjadi prasyarat partisipasi dalam ekonomi pengetahuan abad ke-21 (Rokhmawati et al., 2025).

Dimensi kedua terletak pada kesenjangan literasi digital yang jauh lebih sulit diidentifikasi dan diintervensi dibandingkan kesenjangan akses fisik. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dari keluarga sosioekonomi rendah cenderung menggunakan teknologi digital terutama untuk konsumsi pasif (menonton video, bermain game, media sosial), sementara siswa dari keluarga mampu lebih sering memanfaatkan teknologi untuk produksi konten, pemecahan

masalah kompleks, dan eksplorasi intelektual aktif (Yajie et al., 2023). Perbedaan pola penggunaan ini menghasilkan *digital skill gap* yang semakin lebar seiring waktu, di mana siswa marjinal tertinggal dalam pengembangan kompetensi digital tingkat tinggi seperti coding, analisis data, desain grafis, dan literasi informasi kritis yang semakin menjadi persyaratan untuk mobilitas sosial vertikal (Aslan & Shiong, 2023).

Mekanisme reproduksi juga beroperasi melalui apa yang disebut oleh Jandrić (2022) sebagai *individualization of educational responsibility*, di mana digitalisasi pendidikan menggeser beban pembelajaran dari institusi sekolah ke individu siswa dan keluarga mereka. Dalam ekosistem pembelajaran daring, keberhasilan akademik semakin bergantung pada kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, mengelola waktu, mencari sumber belajar alternatif, dan memecahkan masalah teknis tanpa bantuan langsung guru (Verwiebe & Hagemann, 2025). Kondisi ini secara sistematis menguntungkan siswa dari keluarga dengan modal kultural tinggi, di mana orang tua memiliki kapasitas untuk mendampingi, menyediakan lingkungan belajar kondusif, dan mengakses sumber daya tambahan, sementara siswa dari keluarga marjinal sering kali harus belajar dalam kondisi penuh distraksi, tanpa dukungan parental yang memadai, dan bahkan harus berkontribusi pada ekonomi keluarga di tengah krisis.

Penelitian sebelumnya, yang terjadi di China selama penutupan sekolah pada 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran digital secara signifikan memediasi asosiasi antara status sosioekonomi dengan performa akademik, di mana siswa dari keluarga mampu mengalami penurunan belajar yang lebih kecil atau bahkan peningkatan, sementara siswa dari keluarga rendah mengalami penurunan drastis (Yajie et al., 2023). Fenomena *widening gap* ini juga terkonfirmasi di Indonesia, di mana penelitian menemukan bahwa siswa dari keluarga ekonomi rendah membayar lebih mahal untuk pendidikan daring (dalam proporsi pendapatan) dibandingkan keluarga kaya, namun menerima kualitas pembelajaran yang jauh lebih rendah karena keterbatasan perangkat, kuota internet, dan akses platform premium (Rokhmawati et al., 2025). Paradoks ini memperjelas bagaimana ketimpangan digital berfungsi sebagai mekanisme ekstraksi sumber daya dari kelompok marjinal sambil mengonsolidasikan keuntungan kelompok elit.

Dimensi geografis ketimpangan digital juga memperkuat reproduksi stratifikasi sosial melalui apa yang dapat disebut sebagai *spatial reproduction mechanism*, di mana lokasi tempat tinggal menjadi prediktor kuat terhadap akses pendidikan berkualitas. Indonesia dengan 17.000 pulau dan 530.000 sekolah yang tersebar mengalami tantangan khusus, di mana kesenjangan digital tumpang tindih dengan kesenjangan geografis untuk menciptakan pola ketidakadilan yang multidimensi (Yaqin et al., 2023). Siswa di Jakarta, Surabaya, atau Bandung tidak hanya memiliki akses infrastruktur lebih baik, tetapi juga terpapar pada ekosistem digital pendidikan yang lebih kaya, termasuk akses ke platform pembelajaran internasional, komunitas belajar online, dan mentor digital yang tidak tersedia bagi siswa di Papua, Nusa Tenggara, atau Kalimantan pedalaman (Vincze, 2024).

Mekanisme reproduksi stratifikasi juga terlihat dalam bagaimana sistem pendidikan merespons ketimpangan digital melalui kebijakan yang sering kali bersifat *middle-class biased*, yaitu mengasumsikan bahwa semua siswa memiliki akses dan kompetensi digital yang setara. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Learning Management System (LMS) lainnya diadopsi secara massal tanpa disertai analisis kritis terhadap kesiapan diferensial siswa, sehingga secara

tidak langsung mendiskriminasi siswa yang tidak memiliki modal digital awal (Amalia et al., 2025). Akibatnya, sekolah-sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai *equalizer* justru berubah menjadi *sorting machines* yang mengkategorikan siswa berdasarkan latar belakang digital mereka dan mengalokasikan sumber daya pendidikan secara tidak merata (Rafalow & Puckett, 2022).

Lebih jauh, ketimpangan digital juga mereproduksi stratifikasi sosial melalui mekanisme *network effect* dan *accumulative advantage*, di mana siswa dengan literasi digital tinggi cenderung memperoleh lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui partisipasi dalam kompetisi online, program beasiswa digital, dan jejaring pembelajaran global, sementara siswa dengan literasi rendah semakin terpinggirkan (Aslan & Sidabutar, 2025). Fenomena ini sesuai dengan apa yang disebut Merton (1968) sebagai *Matthew Effect*—"yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin"—yang dalam konteks digital berarti bahwa keuntungan awal dalam literasi digital menghasilkan keuntungan kumulatif yang semakin besar seiring waktu, sementara kerugian awal sulit dikompensasi tanpa intervensi struktural yang masif (Vincze, 2024).

Dampak jangka panjang dari mekanisme reproduksi ini sangat mengkhawatirkan, karena ketimpangan digital tidak hanya mempengaruhi performa akademik saat ini, tetapi juga menentukan prospek mobilitas sosial di masa depan. Di ekonomi pengetahuan abad ke-21, literasi digital menjadi prasyarat untuk akses ke pendidikan tinggi berkualitas, pekerjaan bergaji tinggi, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial-politik (Nurfaisal et al., 2024). Siswa yang mengalami *digital exclusion* selama masa kritis pembentukan kompetensi ini berisiko tinggi terjebak dalam siklus kemiskinan struktural, di mana ketiadaan modal digital membatasi akses mereka ke kesempatan pendidikan dan ekonomi, yang pada gilirannya membatasi kapasitas mereka untuk mengakumulasi modal digital bagi generasi berikutnya.

Dengan demikian, ketimpangan digital dalam pendidikan pasca-pandemi bukan sekadar masalah teknis yang dapat diselesaikan melalui distribusi perangkat atau pelatihan literasi dasar, melainkan merupakan mekanisme struktural yang secara sistematis mereproduksi dan memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada. Tanpa intervensi kebijakan yang radikal dan transformatif—yang tidak hanya menyediakan akses infrastruktur tetapi juga mendekonstruksi bias kelas dalam desain dan implementasi teknologi pendidikan—digitalisasi pendidikan berisiko menjadi instrumen legitimasi baru bagi ketidaksetaraan struktural, di mana keberhasilan atau kegagalan akademik semakin dikaitkan dengan meritokrasi digital yang sebenarnya hanyalah kelanjutan dari privilese kelas dalam bentuk baru.

### **Peran Sekolah dalam Memperlebar atau Mempersempit Jurang Pendidikan di Era Pasca-Pandemi**

Sekolah di era pasca-pandemi berada pada persimpangan jalan yang menentukan mereka dapat berfungsi sebagai agen transformatif yang mempersempit jurang pendidikan melalui kebijakan inklusif dan inovasi pedagogis, atau sebaliknya, menjadi mekanisme institusional yang memperlebar ketidaksetaraan melalui adopsi teknologi yang tidak kritis dan bias kelas. Dualitas peran ini menjadi semakin tajam di Indonesia, di mana 288.865 sekolah kini menjadi target program Pembelajaran Digital nasional yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025, dengan janji pemerataan akses teknologi dari kota hingga daerah terpencil (Aslan & Nur, 2025). Namun, keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada distribusi

perangkat keras, melainkan pada kapasitas sekolah untuk mengimplementasikan strategi pedagogis yang responsif terhadap heterogenitas digital siswa dan berkomitmen pada prinsip keadilan pendidikan yang substantif, bukan sekadar kesetaraan formal.

Di satu spektrum, sekolah memiliki potensi luar biasa untuk mempersempit jurang pendidikan melalui implementasi model pembelajaran hibrida (*hybrid learning*) yang secara pragmatis mengintegrasikan elemen sinkronus dan asinkronus sesuai dengan kondisi infrastruktur lokal. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran hibrida secara signifikan meningkatkan performa akademik dan kepuasan belajar siswa dibandingkan dengan model daring penuh atau tatap muka penuh, terutama karena fleksibilitasnya dalam mengurangi ketergantungan pada koneksi internet berkecepatan tinggi yang tidak merata di seluruh Indonesia (Yaqin et al., 2023). Sekolah-sekolah yang berhasil mengadopsi pendekatan ini merancang kurikulum yang memungkinkan siswa dengan akses terbatas untuk mengunduh materi secara asinkronus saat koneksi tersedia, kemudian berpartisipasi dalam diskusi sinkronus secara bergiliran atau melalui moda rendah-bandwidth seperti WhatsApp atau SMS, sehingga memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena kendala infrastruktur (Yaqin et al., 2023).

Strategi kedua yang dapat ditempuh sekolah untuk mempersempit jurang adalah melalui program literasi digital yang afirmatif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menargetkan siswa tetapi juga guru dan orang tua dari latar belakang marjinal. Pelatihan literasi digital untuk guru di daerah terpencil telah terbukti meningkatkan kapasitas pedagogis mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran inklusif, dengan fokus pada pengembangan kompetensi TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) yang memungkinkan integrasi teknologi yang bermakna ke dalam konten kurikulum (Judijanto & Aslan, 2025). Sekolah yang berkomitmen pada keadilan digital juga mendirikan *digital learning communities* internal, di mana guru-guru berbagi praktik terbaik, mengembangkan konten lokal yang relevan secara kultural, dan saling mendukung dalam mengatasi hambatan teknis, sehingga menciptakan ekosistem pembelajaran profesional yang kolaboratif dan berkelanjutan (Pramesworo & Aslan, 2026).

Lebih jauh, sekolah dapat berperan sebagai *equalizer* melalui kebijakan afirmatif yang secara sengaja mengalokasikan sumber daya digital lebih besar kepada siswa dari latar belakang sosioekonomi rendah. Ini dapat berupa program pinjaman perangkat jangka panjang, subsidi kuota internet yang ditargetkan, akses prioritas ke laboratorium komputer sekolah di luar jam belajar, dan pendampingan belajar oleh guru atau tutor sebaya yang memiliki kompetensi digital tinggi (Amalia et al., 2025). Beberapa sekolah pionir di Indonesia telah mengimplementasikan *digital equity funds*, yaitu dana khusus yang dialokasikan dari anggaran sekolah atau hasil kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki akses minimal yang memadai terhadap perangkat dan konektivitas yang diperlukan untuk pembelajaran (Prasetyaningsih et al., 2025). Kebijakan semacam ini mengakui bahwa kesetaraan formal—memberikan perlakuan sama kepada semua siswa—tidak cukup; keadilan substantif memerlukan perlakuan diferensial yang kompensatoris untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang sudah ada.

Namun, di spektrum sebaliknya, sekolah juga dapat secara tidak sengaja—atau bahkan sengaja—memperlebar jurang pendidikan melalui adopsi teknologi yang tidak kritis dan bias terhadap siswa dari kelas menengah-atas. Fenomena *school digital divide* terjadi ketika sekolah-sekolah elit dengan sumber daya finansial memadai mengadopsi platform pembelajaran

premium, perangkat mutakhir, dan program pelatihan guru berkualitas tinggi, sementara sekolah-sekolah publik dengan anggaran terbatas hanya menerima infrastruktur dasar tanpa dukungan pedagogis yang memadai (Saputra et al., 2024). Disparitas ini menciptakan stratifikasi institusional baru, di mana kualitas pendidikan semakin ditentukan oleh status sosioekonomi rata-rata siswa yang dilayani sekolah, sehingga memperkuat segregasi sosial dan mengurangi mobilitas vertikal antar kelas (Fitroh & Aslan, 2026).

Mekanisme memperlebar jurang juga beroperasi melalui apa yang disebut sebagai *pedagogical technologism*, yaitu keyakinan naif bahwa kehadiran teknologi secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa disertai transformasi pedagogis yang mendalam. Banyak sekolah di Indonesia, dalam antusiasme mereka untuk mengimplementasikan program Pembelajaran Digital nasional, fokus pada instalasi Interactive Flat Panel (IFP) dan distribusi laptop tanpa investasi paralel dalam pengembangan kapasitas guru untuk mengintegrasikan teknologi ini secara bermakna ke dalam praktik mengajar (Nurfaisal et al., 2024). Akibatnya, teknologi menjadi sekadar gimmick atau alat presentasi satu arah yang tidak meningkatkan keterlibatan kognitif siswa, dan justru menguntungkan siswa yang sudah memiliki literasi digital tinggi dari rumah sementara menyingkirkan siswa yang membutuhkan scaffolding pedagogis lebih intensif (Imaduddin & Firdaus, 2025).

Dimensi lain dari peran sekolah dalam memperlebar jurang terlihat dalam komersialisasi pendidikan daring melalui kemitraan dengan penyedia platform EdTech swasta yang mengutamakan profit daripada pemerataan. Platform-platform ini sering kali menawarkan fitur premium yang hanya dapat diakses melalui berlangganan berbayar, sehingga sekolah-sekolah kaya dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang diperkaya dengan analitik belajar adaptif, konten interaktif canggih, dan umpan balik otomatis, sementara sekolah-sekolah miskin terjebak dengan versi gratis yang terbatas fungsinya (Firmansyah & Aslan, 2025a). Fenomena ini menciptakan *two-tier education system* dalam bentuk digital, di mana kualitas pendidikan semakin dikomodifikasi dan akses ke pembelajaran berkualitas menjadi fungsi dari kemampuan membayar, bukan hak universal yang dijamin negara (Nurdiana et al., 2023).

Selain itu, sekolah dapat memperlebar jurang melalui praktik evaluasi dan asesmen yang bias digital, di mana tugas-tugas yang memerlukan akses teknologi tinggi, produksi konten multimedia, atau partisipasi dalam platform kolaboratif online menjadi standar penilaian tanpa mempertimbangkan disparitas akses siswa. Penelitian menunjukkan bahwa ketika guru mengasumsikan semua siswa memiliki akses setara terhadap perangkat dan konektivitas, mereka secara tidak langsung mendiskriminasi siswa marjinal yang tidak dapat menyelesaikan tugas karena kendala teknis di luar kendali mereka (Yajie et al., 2023). Akibatnya, nilai akademik semakin mencerminkan privilese digital siswa daripada kompetensi substantif mereka dalam mata pelajaran yang dinilai, sehingga sistem penilaian berubah dari alat pengukuran belajar menjadi mekanisme legitimasi ketidaksetaraan.

Namun, terdapat juga contoh inspiratif dari sekolah-sekolah yang secara sengaja mendekonstruksi bias ini melalui *digital justice pedagogy*, yaitu pendekatan pedagogis yang secara kritis mengakui dan mengatasi ketimpangan digital sebagai bagian integral dari praktik mengajar. Guru-guru yang mengadopsi pendekatan ini merancang tugas yang dapat diselesaikan melalui multiple moda (digital dan non-digital), menyediakan waktu dan ruang di sekolah untuk siswa tanpa akses rumah untuk menyelesaikan tugas berbasis teknologi, dan menggunakan teknologi

bukan sebagai end goal melainkan sebagai alat untuk mengamplifikasi suara dan perspektif siswa marjinal (Verwiebe & Hagemann, 2025). Sekolah-sekolah ini juga mengintegrasikan pendidikan kritis tentang teknologi ke dalam kurikulum, membantu siswa memahami bagaimana algoritma, platform digital, dan ekonomi perhatian dapat mereproduksi ketidaksetaraan, sehingga membekali mereka dengan literasi kritis yang diperlukan untuk navigasi dunia digital yang kompleks (Vincze, 2024).

Peran kepemimpinan sekolah juga menjadi faktor penentu dalam apakah institusi pendidikan memperlebar atau mempersempit jurang. Kepala sekolah yang visioner dan berkomitmen pada keadilan digital tidak hanya memastikan distribusi infrastruktur yang merata, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang menghargai diversitas modal digital siswa, mendorong inovasi pedagogis yang inklusif, dan membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengamankan sumber daya tambahan (Prasetyaningsih et al., 2025). Sebaliknya, kepemimpinan yang transaksional dan berorientasi pada pencapaian indikator kuantitatif semata cenderung mengadopsi teknologi sebagai simbol modernitas tanpa refleksi kritis terhadap dampaknya terhadap keadilan pendidikan, sehingga memperkuat status quo ketidaksetaraan (Purike & Aslan, 2025).

Dalam konteks kebijakan nasional, program Pembelajaran Digital yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2025 menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi sekolah. Di satu sisi, distribusi 288.865 Interactive Flat Panel, laptop, dan paket konten digital ke seluruh sekolah merupakan investasi infrastruktur terbesar dalam sejarah pendidikan Indonesia yang berpotensi mendemokratisasi akses ke materi pembelajaran berkualitas. Di sisi lain, tanpa disertai dengan pelatihan guru yang memadai, dukungan teknis berkelanjutan, dan kerangka implementasi yang sensitif terhadap konteks lokal, program ini berisiko menjadi contoh klasik *technology push* yang gagal menghasilkan transformasi pedagogis yang bermakna dan justru memperlebar kesenjangan antara sekolah yang siap dan yang tidak siap (Nurfaisal et al., 2024).

Dengan demikian, peran sekolah dalam memperlebar atau mempersempit jurang pendidikan di era pasca-pandemi bukanlah determinisme struktural yang tak terelakkan, melainkan hasil dari pilihan strategis, komitmen nilai, dan kapasitas institusional yang dapat dibentuk melalui kebijakan yang tepat dan kepemimpinan yang visioner. Sekolah yang memilih jalur keadilan digital akan mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan infrastruktur, pedagogi, kapasitas guru, dan kebijakan afirmatif dalam ekosistem yang koheren, sementara sekolah yang terjebak dalam logika teknokratis dan komersial akan semakin memperkuat mekanisme reproduksi stratifikasi sosial yang sudah ada. Pilihan ini bukan hanya menentukan masa depan individu siswa, tetapi juga masa depan demokrasi dan keadilan sosial Indonesia di abad ke-21, karena pendidikan yang inklusif dan berkeadilan adalah prasyarat fundamental bagi mobilitas sosial vertikal dan kohesi nasional yang berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Ketimpangan digital dalam pendidikan era pasca-pandemi bukan sekadar masalah teknis yang dapat diselesaikan melalui distribusi perangkat atau pelatihan literasi dasar, melainkan merupakan mekanisme struktural yang secara sistematis mereproduksi stratifikasi sosial yang sudah ada. Melalui transformasi modal kultural tradisional menjadi *digital cultural capital*, ketimpangan akses, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi berfungsi sebagai instrumen

legitimasi baru bagi ketidaksetaraan, di mana siswa dari kelas menengah-atas memperoleh keuntungan kumulatif dari ekosistem digital yang mendukung keberhasilan akademik mereka, sementara siswa dari latar belakang marjinal semakin terpinggirkan dalam siklus *digital exclusion* yang sulit diputus tanpa intervensi radikal. Fenomena ini memperjelas bahwa pandemi COVID-19 tidak menciptakan ketidaksetaraan baru, melainkan mempercepat dan mengonsolidasikan ketidakadilan struktural yang sudah mengakar dalam bentuk digital yang lebih tersembunyi namun sama destruktifnya.

Di tengah dinamika ini, sekolah berada pada persimpangan jalan yang menentukan mereka dapat berfungsi sebagai agen transformatif yang mempersempit jurang pendidikan melalui implementasi pembelajaran hibrida yang inklusif, program literasi digital yang afirmatif, kebijakan alokasi sumber daya yang kompensatoris, dan pedagogi keadilan digital yang secara kritis mengakui dan mengatasi disparitas akses siswa; atau sebaliknya, menjadi mekanisme institusional yang memperlebar ketidaksetaraan melalui adopsi teknologi yang tidak kritis, bias kelas dalam desain pedagogis, komersialisasi layanan pendidikan daring, dan praktik asesmen yang mengasumsikan kesetaraan akses yang tidak ada dalam realitas. Pilihan strategis ini bukanlah determinisme struktural yang tak terelakkan, melainkan hasil dari komitmen nilai, kapasitas kepemimpinan, dan kualitas kebijakan yang dapat dibentuk melalui refleksi kritis dan tindakan kolektif yang terkoordinasi.

Oleh karena itu, mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di era pasca-pandemi memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan teknokratis yang berfokus pada infrastruktur semata menuju pendekatan holistik yang mengintegrasikan akses fisik, pengembangan kapasitas pedagogis guru, kebijakan afirmatif yang ditargetkan, dan dekonstruksi bias kelas dalam desain dan implementasi teknologi pendidikan. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang tidak hanya menyediakan alat, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa—terlepas dari latar belakang sosioekonomi, lokasi geografis, atau modal digital awal—memiliki kesempatan substantif untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran bermakna, pengembangan potensi maksimal, dan mobilitas sosial vertikal. Hanya dengan komitmen kolektif terhadap keadilan digital yang substantif, pendidikan pasca-pandemi dapat benar-benar berfungsi sebagai *great equalizer* yang mendemokratisasi akses pengetahuan dan membuka jalan bagi masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, kohesif, dan berkeadilan sosial.

## References

- Amalia, R., Aini, R. Q., Paradita, J., & Br, A. D. M. (2025). Bridging The Digital Divide: The Role of Technology in Enhancing Rural SMES in Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 27–34. <https://doi.org/10.17509/jimb.v16i1.82681>
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Aslan, A., & Nur, R. F. (2025). IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE AND EQUALITY IN EDUCATION: A LITERATURE REVIEW OF EFFORTS TO ELIMINATE DISCRIMINATION AND BUILD MUTUAL RESPECT IN SCHOOLS. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(11), Article 11.

- Aslan, A., & Shiong, P. K. (2023). Learning in the Digital Age Full of Hedonistic Cultural Values Among Elementary School Students. *Bulletin of Pedagogical Research*, 3(2), 94–102. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.515>
- Aslan, A., & Sidabutar, H. (2025). APPLICATION OF PIAGET’S THEORY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT. *International Journal of Teaching and Learning*, 3(1), Article 1.
- Aslan, A., Silvia, S., Nugroho, B. S., Ramli, M., & Rusiadi, R. (2020). TEACHER’S LEADERSHIP TEACHING STRATEGY SUPPORTING STUDENT LEARNING DURING THE COVID-19 DISRUPTION. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 321–333. <https://doi.org/10.31538/ndh.v5i3.984>
- Aslan & Hifza. (2020). The Community Of Temajuk Border Education Values Paradigm On The School. *International Journal of Humanities, Religion and Social Science*, 4(1), 13–20.
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The sociology of economic life* (pp. 78–92). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429494338-6/forms-capital-pierre-bourdieu>
- Caroline, C., & Aslan, A. (2025). Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan melalui Teknologi: Tantangan dan Solusi di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3696>
- Dijk, J. van. (2020). *The Digital Divide*. John Wiley & Sons.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE’S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fan, D., Breslin, D., Callahan, J. L., & Iszatt-White, M. (2022). Advancing literature review methodology through rigour, generativity, scope and transparency. *International Journal of Management Reviews*, 24(2), 171–180. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12291>
- Firdausih, F., & Aslan, A. (2024). LITERATURE REVIEW: THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENT MOTIVATION AND ACHIEVEMENT IN SCIENCE. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), Article 3.
- Firmansyah, F., & Aslan, A. (2025a). EFFECTIVENESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMMES IN PRIMARY SCHOOLS: AN ANALYSIS OF THE LITERATURE. *INJOSEDU: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION*, 2(2), Article 2.
- Firmansyah, F., & Aslan, A. (2025b). THE RELEVANCE OF STEAM EDUCATION IN PREPARING 21ST CENTURY STUDENTS. *International Journal of Teaching and Learning*, 3(3), Article 3.
- Fitriyanti, F., & Aslan, A. (2025). THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN REDUCING LEARNING DISPARITIES AMONG STUDENTS FROM DIFFERENT ECONOMIC BACKGROUNDS. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(3), Article 3.
- Fitroh, I., & Aslan, A. (2026). TECHNOLOGY AND SCIENCE-BASED EDUCATION AS A PILLAR OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY: A LITERATURE REVIEW ON THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE, INCLUSIVE, AND SUSTAINABLE LEARNING MODELS IN THE DIGITAL AGE. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(10), 3142–3154.
- Imaduddin, F., & Firdaus, M. (2025). Bridging the Digital Divide: Theoretical Perspectives on ICT Integration in Indonesian Education Policy. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(2), 895–908. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i2.806>

- Judijanto, L., & Aslan, A. (2025). ADDRESSING DISPARITIES IN MULTISECTORAL EDUCATION: LEARNING FROM AN INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Komari, K., Aslan, A., & Rusiadi, R. (2025). POTRET TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA. *Berajah Journal*, 5(4), 369–378. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i4.616>
- Manullang, S. O., Mardani, M., & Aslan, A. (2021). The Effectiveness of Al-Quran Memorization Methods for Millennials Santri During Covid-19 in Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 195–207.
- Nasution, W. R., & Aslan, A. (2025). INTEGRASI MATA PELAJARAN CODING DAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 4(4), 225–236.
- Nugraha, M. S., Liow, R., & Evly, F. (2021). The Identification of Online Strategy Learning Results While Students Learn from Home During the Disruption of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 1950–1956.
- Nurdiana, R., Effendi, M. N., Ningsih, K. P., Abda, M. I., & Aslan, A. (2023). COLLABORATIVE PARTNERSHIPS FOR DIGITAL EDUCATION TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AT THE INSTITUTE OF ISLAMIC RELIGION OF SULTAN MUHAMMAD SYAFI UDDIN SAMBAS, INDONESIA. *International Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 1–15.
- Nurfaisal, N., Sunengko, S., & Abbas, M. F. F. (2024). Effective Curriculum Management in Islamic Primary Education: A Case Study of Integrated Islamic Schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(4), 4578–4587. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.6211>
- Pitzalis, M., & Porcu, M. (2024). *British Educational Research Journal* | *BERA Journal* | *Wiley Online Library*. <https://doi.org/10.1002/berj.4050>
- Pramesworo, I. S., & Aslan, A. (2026). STRATEGI OPTIMALISASI KESIAPAN PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK TERHADAP PEMANFAATAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI RUANG BELAJAR: ANALISIS LITERATUR MENGENAI MITIGASI RISIKO PLAGIARISME, PENGUATAN INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LITERASI DATA. *Berajah Journal*, 5(12), 914–925. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i12.168>
- Prasetyaningsih, P., Kaniawati, I., Riza, L. S., & Utama, J. A. (2025). The Role of Edutainment in Shaping Modern Education in Indonesia: A Literature Review. *Journal of Mathematics Science and Computer Education*, 5(2), 171–187. <https://doi.org/10.20527/jmscedu.v5i2.16823>
- Purike, E., & Aslan, A. (2025). A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL AND TRADITIONAL LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Putra, P., Liriwati, F. Y., Tahrim, T., Syafrudin, S., & Aslan, A. (2020). The Students Learning from Home Experiences during Covid-19 School Closures Policy In Indonesia. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(2), 30–42. <https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.1019>
- Rafalow, M. H., & Puckett, C. (2022). Sorting Machines: Digital Technology and Categorical Inequality in Education. *Educational Researcher*, 51(4), 274–278. <https://doi.org/10.3102/0013189X211070812>
- Rokhmawati, Z., Aslan, A., & Farchan, A. (2025). Inovasi Teknologi dalam Pendidikan Jarak Jauh: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3735>

- Saputra, H., Usman, S., Sakka, A. R., & Aslan, A. (2024). The Effect Of Using Learning Media On Learning Motivation About Creed and Morals At Mas Ushuluddin Singkawang. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i1.3698>
- Verwiebe, R., & Hagemann, S. (2025). Bourdieu revisited: New forms of digital capital – emergence, reproduction, inequality of distribution. *Information, Communication & Society*, 28(11), 1861–1883. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2358170>
- Vincze, A. (2024). *In the footsteps of Bourdieu towards digital capital*. [http://acta.bibl.u-szeged.hu/85126/1/belvedere\\_2024\\_001\\_024-042.pdf](http://acta.bibl.u-szeged.hu/85126/1/belvedere_2024_001_024-042.pdf)
- Yajie, L., Liu, H., & Gaoming, M. (2023). Widening Digital Divide: Family Investment, Digital Learning, and Educational Performance of Chinese High School Students During the COVID-19 Pandemic School Closures. *Applied Research in Quality of Life*, 18(5), 2397–2413. <https://doi.org/10.1007/s11482-023-10191-y>
- Yaqin, L. N., Prasajo, L. D., Haji-Othman, N. A., Yusof, N., & Habibi, A. (2023). Addressing the Digital Divide in Indonesian Higher Education: Insights, Implications, and Potential Solutions. In Ł. Tomczyk, F. D. Guillén-Gámez, J. Ruiz-Palmero, & A. Habibi (Eds.), *From Digital Divide to Digital Inclusion: Challenges, Perspectives and Trends in the Development of Digital Competences* (pp. 291–307). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-7645-4\\_13](https://doi.org/10.1007/978-981-99-7645-4_13)